

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembangunan nasional ada satu aspek yang paling penting dimana akan menjadi tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu pembangunan ekonomi. Tujuan pokok pembangunan ekonomi adalah untuk membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan dan industri. Modal juga diperlukan untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, jalan raya, jalan kereta api, dan sebagainya. Singkatnya, hakekat pembangunan ekonomi adalah penciptaan modal overhead sosial dan ekonomi (Jhingan, 1992).

Pada negara yang masuk dalam kategori berkembang, pembangunan ditekankan pada pembangunan ekonomi, hal ini terjadi karena masih adanya keterbelakangan ekonomi. Dengan adanya pembangunan ekonomi akan mampu mendorong perubahan di sektor sektor lainnya. Dimana keterbelakangan utama yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang adalah di sektor ekonomi (Siagian, 1984).

Pembangunan ekonomi tidak dapat terjadi dengan sendirinya, tentu memerlukan usaha berbagai pihak untuk berkontribusi memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi umat manusia. Pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan pendapatan perkapita dan pendapatan

nasional. Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang dan jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam masa satu tahun. Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari tahun ke tahun dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Dalam pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Suryanana, 2000).

Untuk menganalisis pembangunan ekonomi pada suatu negara, salah satu yang dapat dijadikan indikator ukuran adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan dimana suatu keadaan kegiatan perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat digunakan sebagai penentu arah pembangunan di masa depan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan dari pembangunan. Dimana selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus disertai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Ukuran ekonomi di daerah (provinsi atau kabupaten) menggunakan istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap

sebagai perencanaan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab (Kuncoro, 2004). Pada dasarnya pembangunan daerah memiliki tujuan meningkatkan jumlah dan peluang kerja yang dapat diakses oleh masyarakat di daerah. Sehingga pemerintah daerah dan masyarakat harus mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah agar mampu merancang sebuah strategi pembangunan perekonomian daerah. Karena potensi daerah yang bisa dikelola secara maksimal dan baik akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat daerah dan ekonomi daerah akan menjadi stabil. Dari pengelolaan sumber daya alam yang maksimal dalam potensi daerah tersebut dapat terjadi pemerataan pendapatan masyarakat. Pemerataan pendapatan masyarakat menjadi salah satu indikator penilaian sejauh mana kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Otonomi daerah adalah bukti pemerintah daerah benar benar serius dalam membangun daerah dengan mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 dan direvisi kembali menjadi UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan diterapkannya otonomi daerah pemerintah daerah dapat maksimal dalam mengelola sumber daya alam daerahnya sendiri yang bertujuan membangun daerahnya, namun dengan

konsekuensi pemerintah daerah beserta perangkatnya harus bekerja keras agar mampu mencapai apa yang menjadi tujuan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru, serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat saling bekerjasama dalam mengelola sumberdaya daerah yang tersedia, bentuk kerjasama antar semua pihak dengan menjalin pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dan pihak swasta untuk penciptaan lapangan kerja, sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan pembangunan yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja secara maksimal baik dari segi jumlah, produktivitas dan efisiensi. Dimana pada penentuan kebijakan memperhitungkan kondisi internal maupun perkembangan eksternal daerah tersebut. Letak perbedaan kondisi internal dan eksternal adalah terletak pada jangkauan wilayah, dimana internal meliputi daerah atau regional, sedangkan kondisi eksternal meliputi nasional. Pendapatan regional yang terus tumbuh merupakan salah satu indikator yang menggambarkan makin meningkatnya kegiatan ekonomi pada daerah tersebut. Indikator lainnya adalah pendapatan

perkapita, dimana semakin tinggi pendapatan perkapita maka akan semakin baik perekonomiannya daerah tersebut.

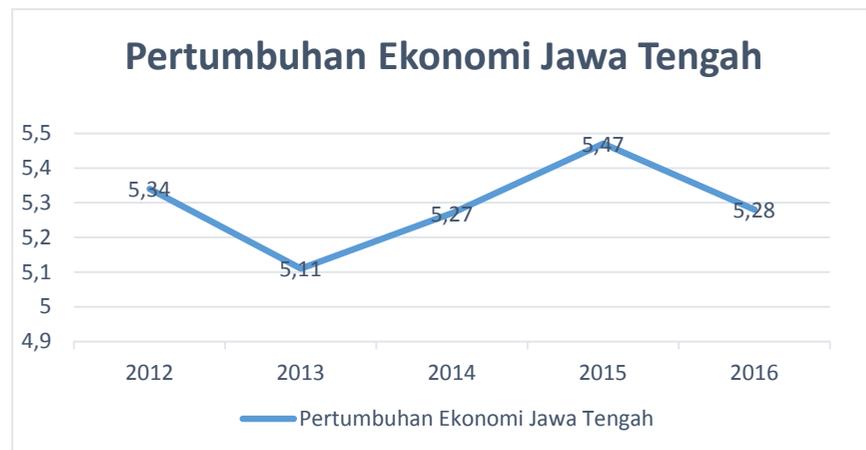
Pembangunan ekonomi daerah yang berhasil baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dalam upaya peningkatan kesejahteraan penduduk dapat dinilai melalui produk domestik regional bruto (PDRB). Produk domestik regional bruto adalah indikator untuk bias mengetahui seberapa tingkat keberhasilan pembangunan daerah yang telah terlaksanakan, sekaligus berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa mendatang. Semakin mampu menggali potensi perekonomian daerah yang ada, akan semakin besar Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah, sehingga mampu meningkatkan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Pembangunan daerah dapat dikategorikan dalam beberapa sektor ekonomi, yaitu: pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, administrasi pemerintah, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya, yang menjadi kategori secara makro pertumbuhan dan peningkatan PDRB dari tahun ke tahun merupakan indikator keberhasilan.

Pertumbuhan PDRB tidak lepas dari peran setiap sektor-sektor ekonomi. Dimana karena aktifitas ekonomi yang terus berjalan menyebabkan

perubahan dari tiap tiap sektornya. Besar kecilnya kontribusi pendapatan setiap sektor ekonomi merupakan hasil perencanaan serta pertumbuhan yang dilaksanakan di daerah. Semakin besar sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap PDRB suatu daerah maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik.

Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang memiliki karakteristik yang unik dengan mengandalkan industri pengolahan. Dimana besarnya sumbangan industri pengolahan dalam PDRB Provinsi Jawa Tengah sangat besar. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2015 dengan 6 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,06 persen.



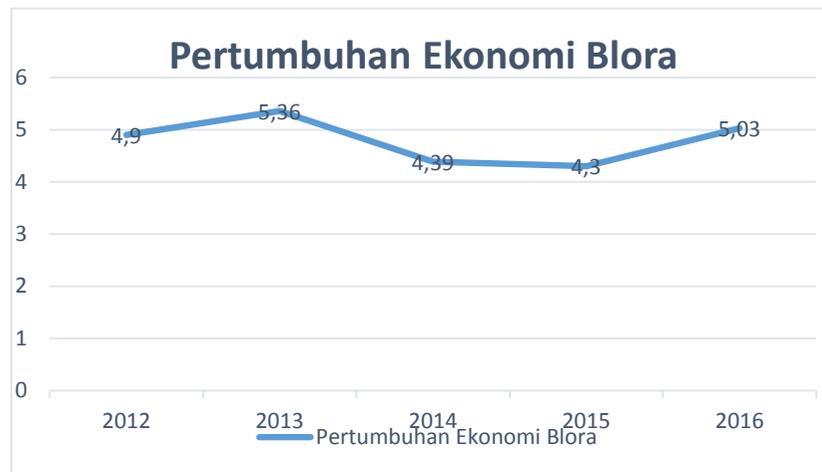
Sumber: BPS Jateng 2016

Gambar 1.1
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah 2012-2016

Kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2012-2016 berfluktuatif namun kembali meningkat pada tahun 2015 dimana menurun ditahun 2013. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2016 sebesar 5.28

persen dimana lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional sebesar 5.02 persen.

Kabupaten Blora adalah kabupaten kecil di ujung timur Jawa Tengah. Kabupaten dengan luas 1.820,59 km² . Kabupaten Blora merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola, merencanakan, dan memanfaatkan potensi ekonomi secara optimal yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Blora.



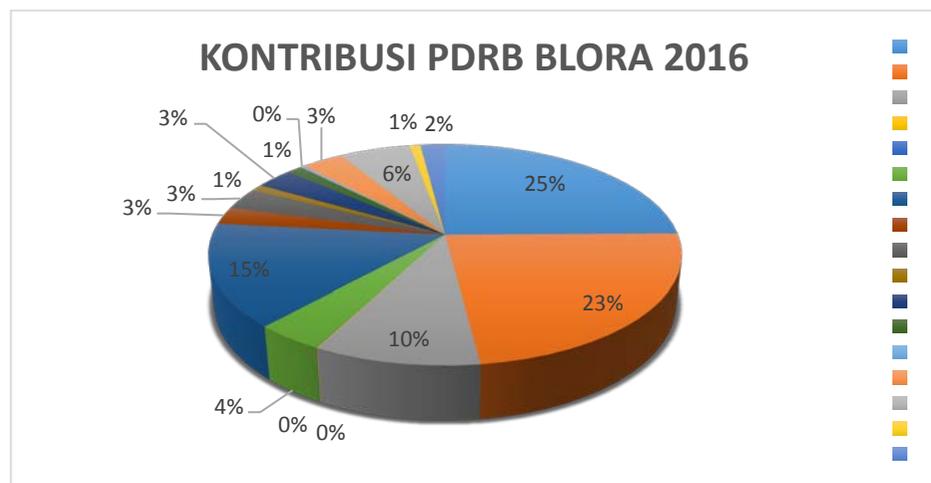
Sumber : BPSumber: Kab Blora 2016

Gambar 1.2

Grafik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora 2012-2016

Dari gambar 1.2 jika diperhatikan selama periode 2012 hingga 2016, pergerakan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora secara agregat cenderung

mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2015 walaupun belum setinggi 2013, dimana pada tahun 2015 mengalami penurunan dan merupakan terendah dalam kurun waktu 2012-2016. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora tahun 2012 sebesar 4.90 persen, lalu pada tahun 2013 meningkat sebesar 5.36 persen. Ditahun 2015 menurun menjadi 4.30 persen dan meningkatnya kembali ditahun 2016 sebesar 5.03 persen.



Sumber: BPS Kab Blora 2016

Gambar 1.3
Kontribusi PDRB kabupaten Blora 2016

- | | |
|--|--|
| 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 9. Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 10. Informasi dan Komunikasi |
| 3. Industri Pengolahan | 11. Jasa Keuangan dan Asuransi |
| 4. Pengadaan Listrik dan Gas | 12. Real Estate |
| 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 13. Jasa Perusahaan |
| 6. Konstruksi | 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib |
| 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 15. Jasa Pendidikan |
| 8. Transportasi dan Pergudangan | 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial |
| | 17. Jasa lainnya |

Dari kontribusi PDRB Blora tahun 2016 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang PDRB terbesar yaitu sebesar 24.80% hal ini

tentunya menjadikan sektor ini menjadi sektor terbesar penyumbang PDRB, di ikuti pertambangan dan penggalan diperingkat ke dua dengan 23.90%, lalu yang menjadi sektor dengan kontribusi terendah adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0.04%.

Blora merupakan salah satu daerah yang punya potensi sektor unggulan. Karena selain pertanian Kabupaten Blora juga menjadi satu satunya Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki migas dalam sektor pertambangan, lalu mempunyai potensi sumber daya alam lain yang cukup besar, seperti batu batuan mulain dari batu onix, batu marmer, dan bahkan bahan baku semen. Namun menempati peringkat 14 Kabupaten dengan presentase penduduk miskin tertinggi. Melihat seluruh kondisi di atas, maka sangat menarik untuk diteliti lebih jauh tentang kontribusi sektoral yang terjadi dan di dasarkan pada strategi kebijakan pembangunan yang tepat, sehingga strategi yang diambil dapat memberikan dampak yang maksimal bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora.

Kabupaten Blora memiliki keunikan geografis dan kaya akan potensi ekonomi, sangat disayangkan strategi meningkatkan kesejahteraan dan devisa regional belum tepat dalam pengoptimalannya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menarik untuk dilakukan penelitian mengenai **“Analisis Strategi Pengembangan Pembangunan Daerah Berbasis Sektor Unggulan (Studi Kasus Kabupaten Blora Tahun 2012-2016)”**.

B. Batasan Masalah

Pembangunan ekonomi memiliki jangkauan yang sangat luas jika dikaji secara leseluruhan. Untuk itu perlu adanya koridor pembatas guna membahas penelitian ini, agar terfokus dan tidak terjadi pelebaran pada penelitian. Batasan masalah penelitian ini yaitu, mengkaji sektor ekonomi potensial yang akan mampu berkontribusi pada pengembangan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Blora dengan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan data tahunan, dari tahun 2012 sampai dengan 2016.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakan diatas, permasalahan yang dapat diteliti, yaitu:

1. Apa yang menjadi sektor ekonomi unggulan dan non unggulan guna meningkatkan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Blora?
2. Apa yang menjadi sektor ekonomi potensial guna meningkatkan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Blora?
3. Apa strategi yang digunakan meningkatkan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Blora?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sektor manakah yang merupakan sektor ekonomi unggulan dan non unggulan di Kabupaten Blora.

2. Untuk mengetahui sektor potensial guna dikembangkan sebagai penunjang ekonomi Kabupaten Blora.
3. Untuk mengetahui strategi apa yang digunakan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Blora.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana penerapan dan implementasi teori-teori yang diterima pada saat kuliah di lapangan.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai kondisi perekonomian Kabupaten Blora.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan masukan dalam menentukan arah kebijakan pemerintah terutama dalam bidang ekonomi.